

Menatap Masa Depan Pendidikan Vokasi: 80 Tahun Membangun SDM Unggul Indonesia



Yakin Bakhtiar Siregar

Dosen STARKI

Pendahuluan

Delapan dekade setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menapaki berbagai fase pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks memasuki usia 80 tahun Indonesia Merdeka, refleksi terhadap capaian dan tantangan pembangunan nasional menjadi hal yang krusial, terutama dalam menyiapkan fondasi menuju *Indonesia Emas 2045*. Salah satu aspek kunci dalam agenda tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual tetapi juga keterampilan teknis dan karakter kerja yang kompetitif di era digital dan global saat ini.

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi besar menuju negara maju. Namun demikian, tantangan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap dunia kerja masih menjadi persoalan nyata, terutama di tengah dinamika Revolusi Industri 4.0 dan tantangan *green economy*.

Pendidikan vokasi memiliki posisi strategis dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja (*link and match*). Melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan keterampilan, pendidikan vokasi dipandang sebagai solusi terhadap persoalan *mismatch* antara lulusan dan kebutuhan industri. Berbagai negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Swiss telah menunjukkan bahwa sistem pendidikan vokasi yang kuat dapat menjadi tulang punggung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Di Indonesia, pendidikan vokasi dijalankan melalui berbagai jenjang, termasuk pendidikan menengah kejuruan, diploma tiga, diploma empat (*sarjana terapan*), hingga pendidikan profesi. Namun, masih terdapat stigma bahwa pendidikan vokasi adalah pilihan sekunder dibanding pendidikan akademik. Rendahnya minat terhadap program diploma empat menunjukkan tantangan dalam hal persepsi, mutu, dan relevansi.

Potret Pendidikan Vokasi di Indonesia

1. Kedudukan Pendidikan Vokasi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012). Pendidikan vokasi berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu, terdiri atas program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat atau sarjana terapan. Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 bahwa pendidikan vokasi meliputi pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi (Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi, 2022a). Selain itu, pendidikan menengah kejuruan (SMK) juga menjadi bagian penting dari sistem vokasi yang menyiapkan lulusan untuk langsung terjun ke dunia kerja.

Namun, data menunjukkan bahwa program **Sarjana Terapan (D4)** masih kurang diminati jika dibandingkan dengan program Sarjana (S1) akademik. Menurut data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), proporsi mahasiswa vokasi masih jauh lebih rendah dibanding pendidikan akademik yaitu 903.743 orang, sedangkan mahasiswa program sarjana sebanyak 8.281.591 orang.

2. Perkembangan Kebijakan dan Transformasi Vokasi di Indonesia

Pendidikan vokasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, kompeten, dan mampu bersaing di tingkat global. Sejak era awal kemerdekaan, pendidikan kejuruan atau vokasi lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja teknis yang bersifat operasional. Namun, seiring perkembangan zaman, globalisasi, dan revolusi industri 4.0, paradigma pendidikan vokasi mengalami transformasi menuju sistem yang lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan industri.

Kebijakan pemerintah dalam bidang vokasi semakin diperkuat sejak diterbitkannya revitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Perpres ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri (DUDI), sehingga lulusan tidak hanya memiliki keterampilan dasar tetapi juga kompetensi spesifik sesuai kebutuhan pasar kerja dan mempunyai daya saing.

Transformasi vokasi kemudian semakin diperluas melalui kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui kebijakan ini, pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi

diarahkan untuk lebih fleksibel, inovatif, dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui praktik kerja, magang industri, sertifikasi profesi, serta kewirausahaan. Dengan demikian, lulusan vokasi tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja.

Kehadiran Perpres 68/2022 ini memperluas cakupan revitalisasi, tidak hanya terbatas pada SMK atau perguruan tinggi vokasi, tetapi juga mencakup lembaga pelatihan vokasi. Hal ini menunjukkan pendekatan baru pemerintah yang lebih inklusif, di mana pelatihan vokasi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global.

Transformasi pendidikan vokasi juga tidak lepas dari dukungan regulasi sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Sistem Sertifikasi Kompetensi. Keseluruhan regulasi ini membentuk landasan hukum yang semakin kokoh untuk pengembangan vokasi di Indonesia.

Selain aspek regulasi, transformasi vokasi ditandai dengan penguatan kerja sama internasional. Pemerintah menjalin kolaborasi dengan negara-negara maju yang memiliki sistem vokasi unggul, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Swiss. Model dual system Jerman, misalnya, menjadi inspirasi dalam membangun skema pendidikan vokasi berbasis kemitraan yang seimbang antara sekolah dan industri.

Di era digital, pendidikan vokasi juga bertransformasi dalam aspek metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital, *e-learning*, serta sistem manajemen pembelajaran berbasis daring. Inovasi ini semakin relevan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0, di mana tenaga kerja dituntut menguasai teknologi, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

Dengan serangkaian kebijakan dan transformasi tersebut, pendidikan vokasi di Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih modern, responsif, dan berdaya saing. Tantangan besar yang masih dihadapi adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, keterbatasan sarana prasarana, serta pemerataan akses pendidikan vokasi di seluruh wilayah. Namun, dengan komitmen pemerintah melalui Perpres 68/2022, dukungan industri, serta keterlibatan masyarakat, pendidikan vokasi Indonesia diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menyiapkan SDM unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Tantangan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Meskipun pendidikan vokasi telah menjadi fokus strategis dalam kebijakan pendidikan nasional, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, baik dari sisi struktur, kualitas, maupun persepsi publik. Tantangan-tantangan ini harus dipahami secara utuh agar solusi yang ditawarkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

1. Kesenjangan antara Kurikulum dan Kebutuhan Industri

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi vokasi dengan kebutuhan nyata dunia industri. Kurikulum pendidikan vokasi pada dasarnya dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, memiliki kompetensi teknis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar tenaga kerja. Namun, dalam

praktiknya, masih banyak kurikulum yang tidak sepenuhnya selaras dengan standar kompetensi, teknologi, maupun prosedur kerja yang diterapkan di dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Kesenjangan ini muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, proses penyusunan kurikulum sering kali dilakukan secara internal oleh institusi pendidikan tanpa melibatkan industri secara intensif. Akibatnya, materi pembelajaran lebih menekankan pada aspek teoretis dan administratif, sementara keterampilan praktis yang dibutuhkan industri kurang terakomodasi. *Kedua*, perkembangan teknologi yang begitu cepat menyebabkan banyak keterampilan baru yang dibutuhkan industri tidak segera terintegrasi dalam kurikulum. Misalnya, dalam bidang manufaktur, industri sudah menggunakan teknologi berbasis otomasi dan *Internet of Things (IoT)*, namun banyak sekolah vokasi masih menggunakan peralatan konvensional dalam praktik pembelajaran.

Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara lembaga pendidikan dan industri mengenai definisi kompetensi juga memperlebar kesenjangan. Lembaga pendidikan cenderung mengukur keberhasilan dari sisi akademik dan ketercapaian kurikulum, sementara industri lebih fokus pada keterampilan praktis, etos kerja, kemampuan komunikasi, serta fleksibilitas tenaga kerja dalam menghadapi perubahan. Hal ini menimbulkan fenomena *skill mismatch*, di mana lulusan vokasi memiliki ijazah dan pengetahuan, tetapi belum sepenuhnya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dampak dari kesenjangan kurikulum dengan kebutuhan industri terlihat pada tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK atau diploma, yang seharusnya menjadi tenaga kerja siap pakai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan SDM unggul, efektivitasnya belum optimal jika tidak terjadi penyelarasan berkelanjutan dengan dunia industri.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *link and match* yang lebih konkret, tidak hanya dalam bentuk kerjasama formal, tetapi juga implementasi nyata seperti perancangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, peningkatan program magang, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), sertifikasi kompetensi, serta pemutakhiran fasilitas praktik yang setara dengan teknologi industri. Dengan demikian, pendidikan vokasi di Indonesia dapat lebih adaptif, responsif, dan relevan dalam mencetak lulusan yang siap bersaing di era global.

2. Rendahnya Kualitas Pendidik dan Fasilitas

Kualitas pendidik dan ketersediaan fasilitas pembelajaran merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan vokasi. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik vokasi, baik dari sisi kompetensi pedagogis maupun keterampilan teknis yang sesuai dengan perkembangan industri. Banyak guru atau dosen vokasi yang memiliki latar belakang akademik yang kuat, tetapi belum cukup terpapar dengan praktik nyata di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Akibatnya, proses pembelajaran lebih banyak berfokus pada teori dan belum sepenuhnya memberikan pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan kerja.

Selain itu, pola rekrutmen dan pengembangan karier pendidik vokasi juga masih menghadapi kendala. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan, sertifikasi industri, atau program magang guru ke perusahaan masih terbatas. Padahal, pembaruan pengetahuan dan keterampilan pendidik sangat penting agar mereka dapat mengajarkan teknologi terkini yang digunakan industri. Rendahnya insentif dan kurangnya skema penghargaan bagi pendidik vokasi juga

membuat profesi ini kurang menarik bagi praktisi industri yang berpotensi menjadi tenaga pengajar.

Di sisi lain, fasilitas pembelajaran di banyak sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi juga masih tertinggal jauh dibandingkan dengan teknologi yang digunakan industri. Laboratorium praktik, peralatan mesin, perangkat komputer, hingga *software* yang digunakan dalam pembelajaran sering kali sudah usang dan tidak sesuai standar industri. Kondisi ini menyebabkan siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang mendekati kondisi nyata di tempat kerja. Akibatnya, ketika mereka lulus, sering kali diperlukan waktu tambahan untuk pelatihan ulang (*retraining*) agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri.

Keterbatasan anggaran pendidikan vokasi turut memperburuk situasi ini. Banyak institusi vokasi yang belum mampu melakukan investasi berkelanjutan untuk memperbarui fasilitas praktik atau menjalin kerjasama intensif dengan industri dalam penyediaan peralatan. Hal ini menciptakan ketimpangan kualitas antara sekolah vokasi yang berada di kota besar dengan dukungan industri yang kuat, dan sekolah vokasi di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Rendahnya kualitas pendidik dan fasilitas berimplikasi langsung terhadap daya saing lulusan vokasi. Tanpa tenaga pengajar yang kompeten dan sarana pembelajaran yang memadai, sulit bagi pendidikan vokasi di Indonesia untuk mencetak lulusan yang benar-benar siap kerja dan memiliki daya saing global. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidik melalui program sertifikasi industri, pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi dengan praktisi industri sangat mendesak untuk dilakukan. Demikian pula, investasi dalam modernisasi fasilitas praktik menjadi kunci agar proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teoritis, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Persepsi Negatif terhadap Pendidikan Vokasi

Selain masalah kurikulum, kualitas pendidik, dan fasilitas, tantangan besar lain yang dihadapi pendidikan vokasi di Indonesia adalah adanya persepsi negatif di masyarakat. Pendidikan vokasi masih sering dipandang sebagai pilihan “kelas dua” dibandingkan pendidikan akademik. Banyak orang tua dan siswa lebih mengutamakan jalur pendidikan umum atau universitas karena dianggap lebih prestisius dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, pendidikan vokasi kerap dipersepsikan hanya sebagai jalur alternatif bagi siswa yang kurang mampu secara akademik.

Stigma ini semakin kuat karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa lulusan vokasi belum sepenuhnya memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Tingginya angka pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK, misalnya, sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk meragukan efektivitas pendidikan vokasi. Padahal, kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri, bukan semata-mata karena rendahnya kualitas lulusan.

Persepsi negatif juga muncul karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Di banyak negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Swiss, pendidikan vokasi justru menjadi tulang punggung sistem pendidikan karena mampu mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri. Namun, di Indonesia, pendidikan vokasi masih kalah pamor dibandingkan jalur akademik. Hal ini berpengaruh pada rendahnya minat siswa berprestasi untuk memilih jalur vokasi, sehingga kualitas input peserta didik juga relatif bervariasi.

Dampak dari persepsi negatif ini tidak hanya memengaruhi citra pendidikan vokasi, tetapi juga berimbas pada rendahnya dukungan dari masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintah dalam beberapa aspek. Jika stigma ini terus berlanjut, maka upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi akan terhambat karena tidak memperoleh kepercayaan penuh sebagai pilar penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi publik yang kuat guna mengubah persepsi masyarakat. Pendidikan vokasi harus diposisikan sebagai jalur strategis yang setara dengan pendidikan akademik, dengan keunggulan utama berupa keterampilan praktis, kesiapan kerja, dan peluang berwirausaha. Kampanye mengenai keberhasilan lulusan vokasi, peningkatan kerjasama dengan industri, serta penyediaan jalur karier yang jelas dapat membantu membangun citra positif. Dengan demikian, pendidikan vokasi akan semakin dipandang sebagai pilihan utama, bukan sekadar pilihan alternatif.

4. Ketimpangan Akses dan Kualitas antar Wilayah

Tantangan lain yang cukup signifikan dalam pendidikan vokasi di Indonesia adalah adanya ketimpangan akses dan kualitas antar wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan distribusi sumber daya pendidikan yang tidak merata. Sebagian besar sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi dengan fasilitas lengkap serta dukungan kerjasama industri cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar atau kawasan industri. Sementara itu, sekolah vokasi di daerah terpencil, perbatasan, atau wilayah dengan akses terbatas masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik berkualitas, serta dukungan dunia industri.

Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan mutu pendidikan yang cukup lebar. Siswa vokasi di perkotaan lebih mudah memperoleh akses pada teknologi terkini, program magang, atau kerjasama industri, sehingga kompetensi mereka relatif lebih baik. Sebaliknya, siswa di daerah dengan fasilitas terbatas sering kali hanya memperoleh pengalaman pembelajaran dengan peralatan sederhana yang tidak mencerminkan kondisi nyata di dunia kerja. Hal ini memperlebar jurang kualitas lulusan antar wilayah dan pada akhirnya berdampak pada kesenjangan kesempatan kerja.

Selain faktor infrastruktur, ketimpangan juga dipengaruhi oleh akses informasi. Lembaga vokasi di daerah tertinggal sering kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri terbaru. Minimnya konektivitas internet, keterbatasan akses pada pelatihan guru, serta kurangnya kerjasama dengan dunia usaha membuat inovasi pembelajaran sulit dilakukan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan lembaga vokasi di kota besar yang lebih mudah mengadopsi kurikulum berbasis industri, menggunakan fasilitas modern, dan mengembangkan jejaring dengan perusahaan besar.

Dampak dari ketimpangan ini adalah munculnya disparitas kualitas sumber daya manusia vokasi yang dihasilkan. Lulusan dari wilayah perkotaan lebih berpeluang terserap di pasar kerja global, sementara lulusan dari wilayah terpencil cenderung terhambat dalam persaingan, meskipun sama-sama menempuh pendidikan vokasi. Ketimpangan semacam ini tidak hanya mengurangi efektivitas pendidikan vokasi sebagai penyedia tenaga kerja terampil, tetapi juga berpotensi memperkuat kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih konkret dari pemerintah, seperti pemerataan distribusi guru vokasi berkualitas, pemberian insentif bagi industri yang mau bermitra dengan sekolah vokasi di daerah, serta pembangunan infrastruktur digital yang merata. Selain itu, program revitalisasi pendidikan vokasi juga harus memastikan

agar standar minimal fasilitas dan kualitas pembelajaran dapat dicapai oleh semua lembaga vokasi, baik di kota besar maupun di daerah terpencil. Dengan langkah-langkah tersebut, ketimpangan akses dan kualitas antar wilayah dapat dikurangi, sehingga pendidikan vokasi benar-benar mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia.

5. Keterbatasan Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Salah satu pilar utama keberhasilan pendidikan vokasi adalah adanya keterhubungan yang erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia adalah keterbatasan kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dengan DUDI. Padahal, keberadaan pendidikan vokasi tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan industri karena tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja terampil yang siap pakai.

Dalam praktiknya, kerjasama yang ada sering kali masih bersifat formal dan administratif, misalnya melalui penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*), tetapi tidak selalu diikuti dengan implementasi nyata dalam proses pembelajaran. Banyak program kemitraan yang tidak berkelanjutan atau hanya berjalan di awal, tanpa adanya evaluasi dan tindak lanjut. Akibatnya, manfaat kolaborasi tersebut tidak dirasakan secara optimal oleh siswa maupun institusi pendidikan.

Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara lembaga pendidikan dan industri. Pihak industri sering kali enggan terlibat secara intensif karena menganggap kerjasama pendidikan vokasi membutuhkan investasi waktu, tenaga, dan biaya, sementara manfaat yang diperoleh tidak langsung terasa. Sebaliknya, lembaga pendidikan cenderung kesulitan menyesuaikan kurikulum, jadwal, maupun fasilitas praktik agar sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan adanya *gap* yang cukup lebar antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pengalaman praktik yang dimiliki siswa vokasi. Program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) yang seharusnya menjadi jembatan penting bagi siswa untuk merasakan dunia kerja nyata sering kali hanya bersifat simbolis, dengan durasi singkat dan ruang lingkup terbatas. Akibatnya, siswa atau mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman yang komprehensif untuk memahami budaya kerja, standar mutu, dan teknologi yang digunakan industri.

Selain itu, belum semua sektor industri terbuka untuk menerima siswa vokasi. Industri dengan teknologi tinggi atau tingkat keamanan kerja yang ketat sering menolak kerjasama praktik dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia dalam membimbing siswa atau risiko operasional. Hal ini menambah tantangan bagi sekolah vokasi untuk mencari mitra industri yang relevan.

Keterbatasan kolaborasi dengan DUDI pada akhirnya memperlemah daya saing lulusan vokasi, karena mereka tidak sepenuhnya terpapar dengan standar kerja yang berlaku di industri. Oleh karena itu, diperlukan model kerjasama yang lebih erat dan berkelanjutan, misalnya melalui penyusunan kurikulum bersama, *dual system* (pembelajaran di sekolah dan industri), pelatihan guru oleh industri, hingga program beasiswa dan rekrutmen langsung lulusan oleh perusahaan. Dengan kolaborasi yang lebih nyata, pendidikan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi dunia kerja sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional.

6. Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi

Belum adanya sistem yang terintegrasi untuk memantau kinerja lulusan vokasi (*tracer study*), efektivitas magang, atau kualitas mitra industri menyebabkan kebijakan pengembangan vokasi kurang berbasis data yang akurat.

Tantangan lain yang dihadapi pendidikan vokasi di Indonesia adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) terhadap penyelenggaraan pendidikan. Monitoring dan evaluasi sejatinya berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, kurikulum, kualitas pendidik, serta sarana dan prasarana berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengawasan pendidikan vokasi masih cenderung administratif, berfokus pada pemenuhan dokumen dan laporan, bukan pada penilaian kualitas dan capaian kompetensi lulusan.

Salah satu kelemahan yang menonjol adalah kurangnya instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur keterampilan praktis siswa secara objektif. Penilaian sering kali hanya menekankan aspek teori, sedangkan keterampilan kerja nyata yang seharusnya menjadi inti pendidikan vokasi kurang terukur dengan baik. Selain itu, evaluasi mutu lulusan lebih banyak dilakukan berdasarkan nilai akademik, bukan berdasarkan sertifikasi kompetensi yang diakui industri.

Lemahnya sistem monitoring juga terlihat pada kurangnya tindak lanjut dari hasil evaluasi. Misalnya, temuan mengenai kekurangan fasilitas atau rendahnya kualitas pendidik sering kali tidak segera direspon dengan perbaikan yang konkret. Akibatnya, masalah yang sama terus berulang dari tahun ke tahun. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun DUDI, masih belum terjalin secara optimal dalam proses monitoring dan evaluasi.

Keterbatasan data juga menjadi persoalan tersendiri. Belum adanya basis data terpadu mengenai capaian lulusan vokasi, keterlibatan industri, serta kebutuhan kompetensi di pasar kerja membuat evaluasi kebijakan menjadi sulit dilakukan. Padahal, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk merancang kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dampak dari lemahnya monitoring dan evaluasi adalah sulitnya memastikan bahwa pendidikan vokasi benar-benar mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Tanpa sistem *monev* yang kuat, sulit pula untuk mengukur efektivitas program revitalisasi pendidikan vokasi yang sedang digalakkan pemerintah.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi dengan dunia industri. Misalnya, melalui penerapan *tracer study* lulusan secara berkala, penilaian berbasis sertifikasi kompetensi yang melibatkan lembaga profesi dan industri, serta penggunaan teknologi digital untuk pengawasan mutu pendidikan secara real time. Dengan sistem *monev* yang kuat, pendidikan vokasi akan lebih mudah diarahkan untuk beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kualitas, dan menghasilkan lulusan yang benar-benar siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Kebijakan Penguatan dan Rekomendasi Masa Depan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Menghadapi tantangan abad ke-21 dan menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia, pendidikan vokasi harus menjadi arus utama (*mainstream*) dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat perlu membangun ekosistem pendidikan vokasi yang dinamis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri.

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
 - Integrasi antara dunia pendidikan dan industri melalui peraturan yang mewajibkan kerja sama kurikulum dan praktik kerja lapangan.
 - Peningkatan otonomi institusi vokasi agar dapat merespons kebutuhan lokal dan global secara cepat.
 - Penyesuaian UU Pendidikan Nasional dan UU terkait lainnya untuk menjamin kesetaraan status pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik.
2. Peningkatan Mutu SDM Pendidik dan Infrastruktur
 - Pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi guru vokasi berbasis teknologi dan industri terbaru.
 - Penyediaan fasilitas laboratorium dan workshop modern di SMK, politeknik, dan akademi komunitas.
 - Penguatan lembaga akreditasi vokasi yang independen dan transparan.
3. Kemitraan Strategis dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
 - Insentif fiskal bagi industri yang menjadi mitra pelatihan vokasi dan membuka program magang.
 - Pengembangan lembaga penghubung (liaison office) antara sekolah dan industri.
 - Penerapan “industrial mentor” dalam pembelajaran vokasi.
4. Peningkatan Citra dan Akses Pendidikan Vokasi
 - Kampanye nasional untuk meningkatkan citra pendidikan vokasi sebagai pilihan strategis, bukan alternatif kedua.
 - Pemberian beasiswa vokasi dan skema pembiayaan terjangkau bagi siswa dari kelompok rentan.
 - Pengembangan jalur karier lanjut bagi lulusan vokasi ke D4, S2 terapan, hingga profesional sertifikasi internasional.
5. Pusat Keunggulan dan Internasionalisasi
 - Pembangunan Pusat Keunggulan Vokasi (Center of Excellence) berbasis sektor prioritas nasional (maritim, pariwisata, digital, agribisnis).
 - Mendorong akreditasi internasional dan program kolaboratif dengan institusi luar negeri.
 - Promosi pertukaran siswa dan guru vokasi melalui skema bilateral dan multilateral.

Penutup

Delapan puluh tahun perjalanan Indonesia merdeka menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran pendidikan vokasi dalam membangun sumber daya manusia unggul. Pendidikan vokasi telah memberikan kontribusi nyata dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesenjangan kurikulum dengan kebutuhan industri, rendahnya kualitas pendidik dan fasilitas, persepsi negatif masyarakat, hingga ketimpangan akses antarwilayah.

Namun, tantangan tersebut sekaligus menjadi peluang untuk melakukan transformasi pendidikan vokasi agar lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing global. Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat, pendidikan vokasi dapat menjadi motor penggerak dalam menghadapi revolusi industri 4.0, era digital, dan tuntutan pasar kerja yang dinamis.

Ke depan, pendidikan vokasi di Indonesia harus mampu bertransformasi dari sekadar penyedia tenaga kerja menjadi pusat lahirnya inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan. Dengan

dukungan kebijakan yang tepat, investasi pada kualitas pendidik dan fasilitas, serta perubahan persepsi masyarakat, pendidikan vokasi akan semakin kokoh sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Menatap masa depan, pendidikan vokasi tidak lagi boleh dipandang sebagai pilihan kedua, tetapi sebagai jalur strategis dalam membangun SDM unggul yang berdaya saing global. Inilah saatnya Indonesia menjadikan pendidikan vokasi sebagai lokomotif kemajuan, sehingga cita-cita besar menjadi bangsa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi dapat terwujud./WW.

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022*. <https://www.bps.go.id>
2. Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Capaian Pendidikan Vokasi Indonesia*.
3. Kemendikbudristek. (2023). *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)*. <https://pddikti.kemdikbud.go.id>
4. OECD. (2020). *Vocational Education and Training in Switzerland: Strengths, Challenges and Recommendations*. OECD Reviews of Vocational Education and Training. <https://www.oecd.org>
5. OECD. (2021). *Vocational Education and Training in Indonesia: Strengthening Skills Development*.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi
7. Setiawan, B. (2021). Tantangan pendidikan vokasi di Indonesia: Antara realitas dan harapan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 115–124. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i2.1601>
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. World Bank. (2020). *Indonesia Skills Report: Challenges and Opportunities*.
10. World Bank. (2020). *Preparing Indonesian Youth for the Future of Work*. <https://www.worldbank.org>